SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA KORPORASI NONBANK DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/4/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5874), perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/18/DKEM tanggal 30 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Piutang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Piutang terdiri atas piutang usaha kepada Penduduk dan bukan Penduduk yang akan jatuh waktu:
 - 1) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau

2) lebih ...

- 2) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan;
yang bersifat jual putus atau tidak dapat dikembalikan dan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.
- b. Piutang usaha kepada Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang telah memiliki kontrak atau perjanjian yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.
 - c. Piutang usaha kepada Penduduk yang kontrak atau perjanjiannya ditandatangani sejak tanggal 1 Juli 2015 dapat tetap dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang:
 - 1) berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia; atau
 - 2) transaksi yang mendasarinya diperkenankan dilakukan dalam Valuta Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Cakupan proyek infrastruktur yang dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai proyek infrastruktur strategis mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d. Penentuan proyek infrastruktur strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf c.1) dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang; dan
 - 2) surat persetujuan dari Bank Indonesia.
- e. Untuk piutang usaha sebagaimana dimaksud dalam butir c.2) dibuktikan dengan surat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan butir II.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Pengecualian kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) diberikan bagi:

a. ULN dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menggantikan ULN sebelumnya (*refinancing*);

b. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari:

1) seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral);

2) pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50% (lima puluh persen);

c. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah;

d. ULN dalam Valuta Asing yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral atau multilateral);

e. ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (*trade credit*);

f. ULN dalam Valuta Asing berupa utang lainnya (*other loans*); atau

g. ULN dalam Valuta Asing yang dimiliki perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan minimum “Sehat” yang terakhir dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan

2) memenuhi *gearing ratio* maksimum sebagaimana diatur oleh OJK.

h. ULN dalam Valuta Asing yang dimiliki Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Cakupan proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam butir b dan butir c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4. Menambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JUDA AGUNG
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/6/DKEM TANGGAL 22 APRIL
 2016
 PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30
 DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN
 PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
 PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI
 KORPORASI NONBANK

**DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA
 UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
 DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK**

Nama Lembaga Pemeringkat		Peringkat Setara BB-
Lembaga Pemeringkat Dalam Negeri	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	idBB-
	PT. Fitch Ratings Indonesia	BB-(idn)
Lembaga Pemeringkat Luar Negeri	Moody's Investors Service	Ba3
	Standard & Poor's	BB-
	Fitch Ratings	BB-
	Japan Credit Rating Agency	BB-
	Rating and Investment Information Inc.	BB-

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
 EKONOMI DAN MONETER

JUDA AGUNG

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/6/DKEM TANGGAL 22 APRIL
2016
PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30
DESEMBER 2014 PERIHAL PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI
KORPORASI NONBANK

DAFTAR CAKUPAN PROYEK INFRASTRUKTUR

- a. Infrastruktur transportasi, antara lain:
 - 1) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
 - 2) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 3) sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
 - 4) sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau
 - 5) sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
- b. Infrastruktur jalan, antara lain:
 - 1) jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
 - 2) jalan tol; dan/atau
 - 3) jembatan tol.
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:
 - 1) saluran pembawa air baku; dan/atau
 - 2) jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapannya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.

d. Infrastruktur ...

- d. Infrastruktur air minum, antara lain:
 - 1) unit air baku;
 - 2) unit produksi; dan/atau
 - 3) unit distribusi.
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain:
 - 1) unit pelayanan;
 - 2) unit pengumpulan;
 - 3) unit pengolahan;
 - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
 - 5) saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain:
 - 1) unit pengolahan setempat;
 - 2) unit pengangkutan;
 - 3) unit pengolahan lumpur tinja;
 - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
 - 5) saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:
 - 1) pengangkutan;
 - 2) pengolahan; dan/atau
 - 3) pemrosesan akhir sampah.
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain:
 - 1) jaringan telekomunikasi;
 - 2) infrastruktur e-government; dan/atau
 - 3) infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (*ducting*).
- i. Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain:
 - 1) infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
 - i. pembangkit listrik;
 - ii. transmisi tenaga listrik;
 - iii. gardu induk; dan/atau
 - iv. distribusi tenaga listrik.
 - 2) infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi, antara lain:
 - i. pengolahan;

- ii. penyimpanan;
 - iii. pengangkutan; dan/atau
 - iv. distribusi.
- j. Infrastruktur konservasi energi, antara lain:
- 1) penerangan jalan umum; dan/atau
 - 2) efisiensi energi.
- k. Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain:
- 1) saluran utilitas (tunnel); dan/atau
 - 2) pasar umum.
- l. Infrastruktur kawasan, antara lain:
- 1) kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan *science and technopark*; dan/atau
 - 2) kawasan industri.
- m. Infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).
- n. Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain:
- 1) sarana pembelajaran;
 - 2) laboratorium;
 - 3) pusat pelatihan;
 - 4) pusat penelitian atau pusat kajian;
 - 5) sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
 - 6) inkubator bisnis;
 - 7) galeri pembelajaran;
 - 8) ruang praktik siswa;
 - 9) perpustakaan; dan/atau
 - 10) fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- o. Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain:
- 1) gedung atau stadion olahraga; dan/atau
 - 2) gedung kesenian dan budaya.
- p. Infrastruktur kesehatan, antara lain:
- 1) rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;

- 2) fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
 - 3) laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
- q. Infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:
- 1) lembaga pemasyarakatan;
 - 2) balai pemasyarakatan;
 - 3) rumah tahanan negara;
 - 4) rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
 - 5) lembaga penempatan anak sementara;
 - 6) lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau
 - 7) rumah sakit pemasyarakatan.
- r. Infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:
- 1) perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
 - 2) rumah susun sederhana sewa.

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER

JUDA AGUNG